

TESIS

**LAPORAN KEUANGAN UKM TERHADAP KEMAJUAN
DIGITALISASI UKM, KEMAMPUAN DAN ILMU DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PADA PELAKU UKM DI
KOTA MAKASSAR**

**SME FINANCIAL REPORTS ON THE PROGRESS OF SME
DIGITALIZATION, ABILITY AND SCIENCE IN PREPARATION OF
STANDARD REPORTS FOR SMEs IN MAKASSAR CITY**

**ANDI KABILA T SOSE
A012212016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**LAPORAN KEUANGAN UKM TERHADAP KEMAJUAN
DIGITALISASI UKM, KEMAMPUAN DAN ILMU DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PADA PELAKU UKM DI
KOTA MAKASSAR**

**SME FINANCIAL REPORTS ON THE PROGRESS OF SME
DIGITALIZATION, ABILITY AND SCIENCE IN PREPARATION OF
STANDARD REPORTS FOR SMEs IN MAKASSAR CITY**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**ANDI KABILA T SOSE
A012212016**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LAPORAN KEUANGAN UKM TERHADAP KEMAJUAN DIGITALISASI UKM
KEMAMPUAN DAN ILMU DALAM PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR
PADA PELAKU UKM DI KOTA MAKASSAR

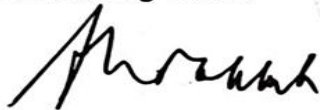
disusun dan diajukan oleh :

ANDI KABILA T. SOSE
A012212016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal **28 JULI 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Abd. Rahkman Laba, S. E., M.B.A.
NIP. 19630125 198910 1 001

Pembimbing Pendamping,



Andi Aswan, S. E., M.B.A., M. Phil., DBA.
NIP. 19770510 200604 1 003

Ketua Program Studi,



Dr. H. M. Sobarsyah, S. E., M. Si.
NIP.19680629 199403 1 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, S. E., M. Si., CIPM.
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi St Kabila Nurul Jihan S.T.Sose
Nim : A012212016
Program studi : Magister Manajemen
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan **Laporan Keuangan UKM Terhadap Kemajuan Digitalisasi UKM, Kemampuan Dan Ilmu Dalam Penyusunan Laporan Standar Pada Pelaku UKM Di Kota Makassar.**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, Juli 2023

Yang Menyatakan,



Andi Kabila T Sose

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Laporan Keuangan UKM Terhadap Kemajuan Digitalisasi UKM, Kemampuan Dan Ilmu Dalam Penyusunan Laporan Standar Pada Pelaku UKM Di Kota Makassar” sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar Magister Manajemen (MM) pada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Peneliti sampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr H. abd.Rakhman Laba , S.E., MBA dan Bapak Andi Aswan, S.E., MBA., M.Phil.,DBA.sebagai pembimbing atas kesediaan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bantuan selama pembuatan tesis.

Ucapan terima kasih kepada Bapak penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan tesis ini dan karyawan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang membantu dalam operasional dan urusan administrasi. Lalu kepada teman-teman yang telah membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan tesis ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada orangtua dan pinoyku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikannya sehingga tesis ini selesai.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam tesis ini, peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dan mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan dan bagi pembaca.

Makassar, 12 Juli 2023

Andi Kabila T Sose

ABSTRAK

ANDI KABILA T SOSE. *Laporan Keuangan UKM terhadap Kemajuan Digitalisasi UKM, Kemampuan dan Ilmu dalam Penyusunan Laporan Standar pada Pelaku UKM di Kota Makassar* (dibimbing oleh Abd.Rakhman Laba dan Andi Aswan).

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah faktor kemajuan digitalisasi ukm, kemampuan ukm dalam penyusunan laporan keuangan dan ilmu dalam penyusunan keuangan berpengaruh pada laporan standar pelaku ukm di Kota Makassar serta mengetahui apakah kemajuan digitalisasi ukm, kemampuan ukm dalam penyusunan laporan keuangan dan ilmu dalam penyusunan laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap laporan standar pada pelaku ukm di Kota Makassar. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian adalah para pemilik ukm di kota makassar, jumlah keseluruhan responden yang diambil dari pemilik ukm di Kota Makassar sebanyak 100 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi olah data *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemampuan ukm dalam penyusunan laporan keuangan dan ilmu dalam penyusunan laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan standar pada pelaku ukm di kota Makassar. Adapun variabel kemajuan digitalisasi berpengaruh positif tapi tidak terlalu signifikan terhadap laporan standar pada pelaku ukm di Kota Makassar. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kemajuan digitalisasi ukm, kemampuan ukm dalam penyusunan laporan keuangan dan ilmu dalam penyusunan laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pada laporan standar pada pelaku ukm di Kota Makassar.

Kata kunci: kemajuan digitalisasi ukm, kemampuan ukm dalam penyusunan laporan keuangan, ilmu dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan standar pada pemilik ukm di Kota Makassar



ABSTRACT

ANDI KABILA T SOSE. *SME's Financial Reports on Progress of SME's (Small and Medium Enterprises) Digitization, Ability and Knowledge in Compiling Standard Reports for UKM Actors in Makassar City* (supervised by Abd. Rakhman Laba and Andi Aswan,

The research aims to investigate whether the progress of the digitalization of SME's, the ability of SME's in preparing the financial reports and the knowledge in preparing the financial reports has an effect on the standard reports of SME's and to investigate whether the progress of the digitalization of SME's, the ability of SME's in preparing the financial reports and knowledge in preparing the financial reports simultaneously influence the standard reports for SME's in Makassar City. This was the descriptive research with the quantitative method. The research data were the primary data from the questionnaires distributed to the respondents. The research populations were UKM owners in Makassar City. The number of the respondents taken from UKM owners in Makassar City was 100 respondents. The data analysis used the Statistical Product and Service Solution (SPSS) and the data processing application version 25. The research result indicates that partially the ability of SME's in preparing the financial reports and knowledge in preparing the financial reports has the significant effect on the standard reports on SME's in Makassar City, while the digitalization progress variable has the positive but not too significant effect on the standard reports for SME's in Makassar City. Simultaneous test result shows that the SME's digitalization progress, the ability of SME's in preparing the financial reports and knowledge in preparing the financial reports have the significant effect on standard reports for SME's in Makassar City.

Key words: SME'S digitalisation progress, the SME'S ability in preparing financial reports, knowledge in preparing financial reports and standard reports for SME's owners in Makassar City



DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
1.5 Rencana Sistematis Penulisan	6
BAB II	8
2.1 Pengertian Digital Ekonomi	8
2.1 Pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	9
2.3 Volume Penjualan	9
2.4 Pendapatan	10
2.5 Pengertian Literasi Keuangan	11
2.6 Identifikasi Tingkat Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan	13
2.6.1 Pandangan Para Ahli Psikologi tentang Gejala Kesadaran	15
2.7 Laporan Keuangan	16

2.7.1	Tujuan Laporan Keuangan.....	17
2.7.2	Jenis Laporan Keuangan	17
2.7.3	Pemakai Laporan Keuangan	18
2.8	<i>Exposure Draft</i> Standart Akuntansi Keuangan Usaha Kecil Menengah	20
2.8.1	Ruang Lingkup.....	21
2.8.2	Tujuan Laporan Keuangan Entitas Kecil Dan Menengah	21
2.8.3	Penyajian Laporan Keuangan	22
2.8.4	Ketentuan Transisi.....	27
2.9	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	28
2.9.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	31
BAB III	33
3.1	Adapun kerangka penelitian sebagai berikut:.....	33
3.2	Hipotesis.....	33
BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	35
4.2	Metode Pengumpulan Data.....	35
4.3.1	Jenis Data.....	36
4.3.2	Sumber Data	37
4.4	Populasi Dan Sampel	37
4.4.1	Populasi.....	37
4.4.2	Sampel	37
4.5	Metode Analisis Data.....	38

4.5.1	Statistik Deskriptif	38
4.5.1	Uji Kualitas Data	39
4.5.2	Uji Asumsi Klasik	40
4.5.3	Uji Hipotesis.....	41
4.6	Definisi Operasional Variabel.....	43
BAB V HASIL PENELITIAN		46
5.1	Gambaran Umum UKM.....	46
5.2	Hasil Penelitian	51
5.2.1	Tanggapan Responden.....	52
5.2.2	Uji Kualitas Data	57
5.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	59
5.2.4	Analisis Regresi Berganda	62
5.2.5	Uji Hipotesis	64
BAB VI PEMBAHASAN		70
BAB VII.....		75
7.1	Kesimpulan	75
7.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kondisi UKM Di Kota Makassar	3
Tabel 2.1 Kriteria Kerja.....	31
Tabel 2.2 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS).....	31
Tabel 4.1 Skala Likert	36
Tabel 4.2 Definisi Operasional Variabel	43
Tabel 5.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	51
Tabel 5.2 Tanggapan Responden Mengenai kemajuan digitalisasi UKM	53
Tabel 5.3 Tanggapan Responden Mengenai kemampuan ukm dalam penyusunan laporan keuangan	54
Tabel 5.4 Tanggapan Responden Mengenai Ilmu dalam penyusunan laporan keuangan	55
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai laporan standar pada pelaku UKM di kota makassar	56
Tabel 5.6 Uji Validitas	57
Tabel 5.7 Uji Releabilitas.....	58
Tabel 5.8 Uji Multikolinearitas	61
Tabel 5.9 Analisis Regresi Berganda	63
Tabel 5.10 Koefisien Determinasi R ²	65
Tabel 5.11 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)	66
Tabel 5.12 Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka piker	33
Gambar 5.1 Uji Normalitas	60
Gambar 5.2 Uji Heteroskedastistas	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sedang menjadi sorotan publik di berbagai negara. Hal itu dikarenakan keberadaan UKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara demikian halnya bagi Indonesia. Di Indonesia UKM merupakan salah satu kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan (*worldbank,2005*). Kontribusinya terhadap PDB pada tahun 1998 mencapai 39,8 %, sementara kontribusinya terhadap pertumbuhan mencapai 16,4 % walaupun penguasaan pangsa pasar hanya mencapai 20 % (Karjantoro, 2002 dalam Hironnymus Jati dkk, 2004). UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan permintaan pasar. UKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya.

Dalam era digital yang pesat saat ini dapat mendorong entrepreneurship untuk membuka wirausaha dengan mudah dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang di dapatkan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) pada tahun 2017 melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. Untuk menumbuhkan jumlah pelaku UKM yang berselancar di dunia maya, Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama

dengan para pelaku e-commerce menggagas program bertajuk 8 Juta UKM Go Online. Lewat kerja sama ini, pemerintah juga berharap dapat mempercepat transformasi UKM di Indonesia menuju digital (Kominfo,2017).

Perkembangan sektor UKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Di sisi lain, UKM seringkali mengalami kendala di pendanaan karena terbatasnya modal. Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh sebagian besar UKM, seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit lunak. Pada kenyataannya, masih banyak UKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya sehingga mengakibatkan para pelaku UKM sulit untuk mendapatkan pinjaman bank. Untuk memperoleh pinjaman dari pihak bank, para pelaku UKM diharuskan menyertakan laporan keuangan sebagai syarat karena pihak bank sendiri tidak ingin mengambil risiko dalam penyaluran kredit bagi UKM lantaran tidak mengetahui perkembangan usaha tersebut.

Terjadinya persaingan dalam dunia bisnis tak bisa dihindarkan lagi, melihat banyaknya pelaku-pelaku bisnis. Bahkan persaingan tersebut kian hari kian bertambah ketat. Boleh dikata, tak ada produk/jasa yang dipasarkan tanpa melewati arena persaingan dalam era ekonomi digital. Ekonomi digital merubah ekonomi global, memungkinkan industri kecil menjadi industri multinasional mikro dengan elastisitas dan dinamika yang mereka miliki. Hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula untuk terlahir secara global, digitalisasi mendorong persaingan karena memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri pada akhir tahun 2016 telah mencapai 916.232 unit usaha. Misalnya

seperti yang terjadi saat ini di Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, UKM di Kota Makassar yang bergerak dalam berbagai industri senantiasa mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, jumlah pelaku UKM sejauh ini sebanyak 2.683 yang bergerak pada beragam sektor.

Tabel 1.1

Data Kondisi UKM Di Kota Makassar 2017-2018

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Tallo	45
2.	Wajo	25
3.	Tamalate	157
4.	Mariso	517
5.	Mamajang	81
6.	Tamalanrea	25
7.	Bontoala	381
8.	Panakuk kang	176
9.	Ujung Pandang	354
10.	Makassar	149
11.	Manggala	312
12.	Ujung Tanah	8
13.	Rappocini	385
14.	Biringkayana	63
15.	Sangkarrang	5
	JUMLAH	2683

Sumber: dinas koperasi dan ukm Kota Makassar (2019)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah membentuk tim kerja untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah. Keberadaan standar akuntansi keuangan (SAK) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) sudah lama dinantikan. Standar ini mengadopsi *International*

Financial Reporting for Small Medium Enterprise (IFRS for SMEs) yang telah diterbitkan pada Februari 2007. Adopsi yang dilakukan oleh DSAK-IAI akan lebih fleksibel.

Lahirnya SAK UKM ini merupakan jawaban atas tuntutan publik terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah yang selama ini membutuhkan standar khusus untuk mengatur UKM. Karakteristik khas yang ada pada UKM membuat berbeda dengan usaha berskala besar dan jika UKM membuat laporan keuangan mengikuti SAK Nasional akan menimbulkan kesulitan dan hambatan bagi UKM, dampaknya bisa menghambat pertumbuhan UKM yang merupakan penggerak roda perekonomian bangsa. Penyusunan standar yang sesuai dengan karakteristik UKM diharapkan bisa memudahkan UKM di Indonesia dalam membuat laporan keuangan (IAI, 2009).

Dengan adanya penyusunan standar khusus yang lebih sederhana karena sesuai dengan karakteristik UKM, maka harapannya para pelaku UKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dapat menumbuhkan kesadaran untuk melakukan praktek penyusunan laporan keuangan.

Dengan adanya kemajuan digitalisasi Seiring dengan perkembangan ekosistem digital, ada beragam aplikasi keuangan yang dapat kita gunakan. Contohnya adalah aplikasi berbasis *desktop* (komputer) maupun yang berbasis *website* (internet). Hampir semua aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan fitur yang serba otomatis, sehingga memudahkan para penggunanya. Selain itu, aplikasi keuangan juga dapat mencetak laporan keuangan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa aplikasi keuangan yang sering digunakan pada pelaku UKM karna memiliki fitur yang simple dan mudah digunakan yaitu Teman Bisnis, Buku kas, Finansialku, Mint, dll.

Dari uraian latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul yaitu “**LAPORAN KEUANGAN UKM TERHADAP KEMAJUAN**

DIGITALISASI, KEMAMPUAN DAN ILMU DALAM PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PADA PELAKU UKM DI KOTA MAKASSAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kemajuan digitalisasi berpengaruh terhadap laporan standar pada Pelaku UKM Di Kota Makassar?
2. Apakah kemampuan penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap laporan standar pada Pelaku UKM Di Kota Makassar?
3. Apakah ilmu dalam penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap laporan standar pada Pelaku UKM Di Kota Makassar?
4. Apakah kemajuan digitalisasi, kemampuan dan Ilmu penyusunan laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap laporan standar pada pelaku UKM Di kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan pemilik usaha kecil menengah (UKM) dalam menyusun laporan keuangan di era digitalisasi.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi wahana melatih dalam melihat fenomena yang terjadi di sekitar penulis, mencari dan menganalisis data yang diperoleh dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.

b. Bagi pelaku UKM

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi tentang tingkat kesadaran UKM itu sendiri dalam menyusun laporan keuangan.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang akan datang dan dapat menjadi bahan bacaan untuk mengetahui mengenai tingkat kesadaran menyusun laporan keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi pihak pihak yang membutuhkan

1.5 Rencana Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang dirincikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah pokok, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis.

Bab III. Metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi operasional variabel penelitian.

Bab IV. Pelaksanaan penelitian yang dari jadwal penelitian, perkiraan biaya dan sistematika penulisan.

Kemudian dalam pengembangan untuk menyusun skripsi, maka akan ditambah tiga bab lanjutan yang akan disusun sebagai berikut:

Bab IV. Menggantikan isi dari bab IV yang sebelumnya pada penulisan proposal, pada bab IV ini penulisan skripsi akan berisi gambaran umum dari lokasi penelitian yang akan menguraikan sejarah perusahaan dan keadaan pada saat perusahaan diteliti.

Bab V. Hasil dari penelitian yang berisi tentang analisis dan pembahasan data yang diperoleh sesuai dengan langkah-langkah yang telah disiapkan pada bab III.

Bab VI. Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran serta keterbatasan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Digital Ekonomi

Istilah ekonomi digital (digital economy) dikenalkan oleh Don Tapscott di tahun 1995 lewat bukunya berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan internet economy, web economy, digital-based economy, new economy knowledge, atau new economy.

Era digital economy atau era new economy muncul sewaktu organisasi mulai mengawinkan produktivitas TI dari sumber daya aktiva dengan knowledge dari sumber daya manusia untuk menjangkau transaksi global lintas batas dalam bentuk connected economy. Di new economy, organisasi memanfaatkan TI sebagai enabler dan strategic weapon. Di era ini pertanyaannya tidak lagi what is your business tetapi lebih ke how is your digital business model. Secara sederhana digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hingga saat ini industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya.

Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

2.1 Pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang semakin cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, perubahan pola bisnis yang mengarah pada proses digitalisasi ini tidak terlalu mengalami kendala dikarenakan dengan karakteristik perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang cukup baik. Namun, bagi UMKM proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan guna mendorong digitalisasi dan mempermudah UMKM dalam menghadapi perubahan yang terjadi, pemerintah telah meningkatkan kemudahan akses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan di dalam persaingan bisnis (Slamet et al., 2016).

Penelitian Delloitte Access Economics (2015) menyatakan bahwa konsumen semakin terbiasa mengambil keputusan berdasarkan konten digital dan melakukan online dalam pembelian barang. Hal ini merupakan tantangan namun juga merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi UMKM di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut terdapat strategi pengembangan digitalisasi UMKM guna mendukung perkembangan UMKM serta sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM dalam menerapkan digitalisasi dalam proses bisnisnya.

2.3 Volume Penjualan

Menurut Basu Swastha DH (2004:403) penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain.

Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama. Digitalisasi UMKM juga akan meningkatkan volume pendapatan UMKM, sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap PDRB. Faktor pendapatan per capita sebagai bagian dari Human Development Index terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. (Feriyanto, 2019).

Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume penjualan tidak memisahkan secara tunai maupun kredit tetapi dihitung secara keseluruhan dari total yang dicapai. Seandainya volume penjualan meningkat dan biaya distribusi menurun maka tingkat pencapaian laba perusahaan meningkat tetapi sebaliknya bila volume penjualan menurun maka pencapaian laba perusahaan juga menurun. Menurut Kotler (2000) volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu dan didalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik.

2.4 Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama

satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang diterima yang diterima seseorang, perusahaan atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

2.5 Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki setiap orang untuk mengelola finansial atau pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang untuk menunjang kesejahteraannya di masa depan. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran seseorang harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik.

Istilah literasi keuangan (financial literacy) banyak ditemukan dan mempunyai definisi menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

Menurut Chen dan Volpe (1998) literasi keuangan (financial literacy) adalah tentang pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dan pemahaman keuangan mengenai tabungan, asuransi dan investasi. Orton (2007) menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman berbagai Negara masih menunjukkan literasi keuangan yang relatif kurang tinggi.

Byrne dalam Rasyid (2012) juga menemukan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah dan menyebabkan bisa dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif lagi. Menurut *President's Advisory Council* dalam penelitian Monticone (2011), Menurut Manurung (2009:24) literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.

Menurut pendapat ahli (Kaly, hudson dan Vush 2008) dalam penelitian Widyawati (2012) mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepatkedalamprilaku. The Presidents Advisory Council Of Financial Literacy dalam penelitian Krisna (2008) juga mendefinisikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan serta keahlian untuk mengelola sumber daya keuangan agar tercapai kesejahteraan. Menurut Lusardi (2007) dalam penelitian Krisna (2008) literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya globalisasi masalah dalam bidang keuangan. Sedangkan menurut Houston (2010) dalam penelitian Widyawati (2012) meyakini bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Remund (2010) dalam penelitian Widyawati (2012) menyatakan ada empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman, dan

investasi. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan tetapi juga atribut nonkognitif

Otoritas Jasa Keuangan (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan manfaat.

2.6 Identifikasi Tingkat Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan

Definisi kesadaran menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996 adalah: “keadaan mengerti nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum-hukum yang ada atau pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum”. Berkaitan dengan kesadaran dalam menyusun laporan keuangan, manusia yang berperan sebagai pelaku bisnis kiranya mempunyai kesadaran untuk menyusun laporan keuangan. Tumbuhnya kesadaran itu bukan hanya karena perilaku atau tindakan menyusun laporan keuangan itu telah diatur dalam standar-standar tertentu tetapi harapannya kesadaran itu pun bertumbuh karena pelaku bisnis mengerti manfaat dari praktek menyusun laporan keuangan tersebut bagi kelangsungan hidup usahanya.

Ronald Clapham (1991) menyatakan bahwa usaha kecil kurang memiliki keterampilan dasar yang sebenarnya diperlukan untuk mengelola suatu usaha agar berhasil. Ditemukan ada kekurangan “*know-how*” pada usaha kecil. Kekurangan pengetahuan tampaknya terjadi di semua bidang dunia usaha, kecuali di sektor yang kecil yakni sektor produksi. Biasanya pengetahuan yang baik mengenai produk atau metode pembuatannya yang mula-mula menjadi faktor pendorong pengusaha untuk

mengambil langkah-langkah untuk membuka usaha sendiri. Ketiadaan pengetahuan sama sekali atau memiliki pengetahuan yang terbatas, dapat dilihat di bidang-bidang seperti pembukuan, menghitung biaya, keuangan, pengadaan dan penyimpanan barang, pengendalian stok barang, membuat jadwal produksi, pengendalian mutu, penjualan dan pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pengusaha tidak memahami neraca dan laporan laba rugi sehingga tidak mampu membaca dan mengambil kesimpulan dari laporan tersebut (Ronald Clapham, 1991:101). Pengusaha tidak mampu mengendalikan dan sejauh mungkin mengurangi biaya produksinya dan sampai batas tertentu, semua kekurangan ini juga ditemukan pada banyak perusahaan menengah. Di Indonesia, banyak sekali pengusaha kecil yang tidak memiliki catatan mengenai pengeluaran dan penerimaan, tidak membedakan antara pengeluaran untuk pribadi dan pengeluaran usaha, dan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai biaya produksi. Dalam banyak hal, nilai kekayaan fisik tidak dikenal karena tidak ada catatan inventaris di banyak perusahaan menengah (Ronald Clapham, 1991:101). Dalam bisnis skala mana pun setiap pelaku usaha memiliki kebiasaan atau cara tertentu untuk mencatat atau menuliskan sesuatu yang dipandang penting sehubungan dengan bisnis yang digelutinya. Misalnya jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, yang sifatnya mengingatkan. Para pelaku bisnis yang skala usahanya relatif kecil khususnya sektor informal memiliki kebiasaan mencatat transaksi dagang secara sederhana dan tidak lengkap. Dengan bantuan ingatan dan keterampilan, mereka dapat menghitung keuntungan tanpa melalui laporan akuntansi (Hironnymus Jati dkk, 2004).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pelaku bisnis sektor informal tidak memiliki catatan tentang transaksi bisnisnya, mereka hanya mengandalkan ingatan karena terbatasnya waktu dan tenaga yang tersedia, kemampuan yang terbatas, dan tidak memahami caranya serta dipandang belum mendesak (Jati dan Timuneno,1997 dalam Hironnymus Jati dkk, 2004). Mereka akan meminta bantuan pihak lain menyusun laporan keuangan usahanya ketika akan mengajukan kredit ke bank atau sebagai prasyarat untuk memperoleh bantuan modal dari pihak tertentu. Hal ini berarti bahwa usaha kecil memiliki kesadaran yang rendah dalam menyusun laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang lazim (Hironnymus Jati dkk, 2004).

2.6.1 Pandangan Para Ahli Psikologi tentang Gejala Kesadaran

Untuk memahami gejala-gejala jiwa, secara teoritis orang membuat satu skema pembagian. Namun hendaknya selalu kita ingat bahwa pembagian semacam ini hanya ada secara teoritis dalam pikiran kita. Sedangkan dalam realitasnya, gejala-gejala tersebut tidak pernah berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Yang dimaksud lingkaran kesadaran ialah luasnya daerah yang bisa dijangkau dengan melihat, mendengar, mengecap, mencium dan merasa. Berkaitan dengan ini orang menyebut “titik pandang dan medan pandang”. Titik pandang adalah satu daerah sempit yang bisa dilihat secara jelas, tepat, dan disadari benar (Mahfudh Shalahuddin, 1991:68).

Bagian lain dilihat secara samar-samar, kurang jelas, tidak tepat dan kurang disadari, dan semuanya terletak di medan pandang. Sedang segala sesuatu yang terletak di luar medan pandang dan titik pandang, tidak kita lihat sama sekali dan tidak kita sadari, yaitu medan ketidaksadaran. Hal-hal berikut adalah gejala-gejala kesadaran yang dibagi dalam empat kelompok (Mahfudh Shalahuddin, 1991:71) , yaitu :

1. Gejala pengenalan
2. Gejala perasaan
3. Gejala kemauan
4. Gejala campuran

Berkaitan dengan gejala-gejala kesadaran, kesadaran menyusun laporan keuangan dapat digolongkan dalam kelompok gejala kemauan. Dalam gejala kemauan terdapat beberapa unsur, antara lain adalah dorongan, keinginan, kecenderungan, dan kemauan (Mahfudh Shalahuddin, 1991:71).

Tumbuhnya kesadaran harus diwujudkan dengan adanya sikap yang baik, dimana tumbuhnya sikap seseorang adalah perwujudan adanya kesadaran tersebut. Namun pada kenyataannya sikap dan kesadaran tiap individu ada kalanya berjalan secara tidak seimbang. Dengan demikian jelas bahwa semuanya akan bisa berjalan apabila ada kesadaran yang tinggi, yang disertai dengan sesuatu perbuatan yang nyata sehingga dapat dilihat hasilnya.

2.7 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pelbagai pihak (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007). Informasi tersebut digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Bagi pihak internal, laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi pihak eksternal, laporan keuangan digunakan salah satunya sebagai dasar pemberian kredit pinjaman modal untuk

perusahaan. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, triwulanan atau tahunan.

2.7.1 Tujuan Laporan Keuangan

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan “Standar Akuntansi Keuangan” (IAI, 2004), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan.
2. Menyediakan informasi yang menyangkut kinerja perusahaan.
3. Menyediakan informasi yang menyangkut perubahan posisi keuangan suatu perusahaan.

Informasi-informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan tersebut memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

2.7.2 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas:

1. Neraca

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat (tanggal) tertentu. Neraca juga disebut juga Laporan Posisi Keuangan. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi

keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:23).

2. Laporan Laba Rugi

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan selama satu perioda dan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:33).

3. Laporan Perubahan Modal

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu perioda akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal merupakan pelengkap dari laporan laba rugi (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:41).

4. Laporan Arus Kas

Adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu perioda tertentu. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasi menurut kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi (Slamet Sugiri dan Bogat Agus R., 2007:45).

2.7.3 Pemakai Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2004) telah menyebutkan beberapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Masing-masing pihak tersebut

mempunyai kepentingan tertentu terhadap isi laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat, mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.8 Exposure Draft Standart Akuntansi Keuangan Usaha Kecil Menengah

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan. *Exposure draft* SAK UKM ini merupakan adopsi *IFRS for Small and Medium-sized entities* dengan beberapa modifikasi yang diperlukan. Oleh IASB, *IFRS for Small and Medium-sized entities* dibuat terpisah dengan IFRS yang untuk umum.

2.8.1 Ruang Lingkup

Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (SAK UKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Entitas kecil dan menengah adalah entitas yang:

1. Yang memenuhi kriteria:
 - a. Tidak memiliki akuntabilitas public yang signifikan; atau
 - b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) kepada pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

2.8.2 Tujuan Laporan Keuangan Entitas Kecil Dan Menengah

Tujuan laporan keuangan entitas kecil dan menengah adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas suatu entitas bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang

telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.8.3 Penyajian Laporan Keuangan

Bab tiga dalam *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan usaha kecil dan menengah, yaitu:

1. Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian jujur (*faithful representation*) sebagai dampak transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan atas aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan Standar ini oleh entitas kecil dan menengah, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas kecil dan menengah. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan yang spesifik atas Standar ini tidak cukup memungkinkan bagi pemakai untuk memahami dampak dari transaksi tertentu, peristiwa lain dan kondisi posisi keuangan dan kinerja entitas.

2. Kepatuhan terhadap SAK UKM

Suatu entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK UKM, membuat suatu pernyataan eksplisit yang menyatakan menerapkan Standar ini secara penuh atas kepatuhannya pada SAK UKM dalam catatan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK UKM kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam Standar ini.

3. Kelangsungan usaha

Pada saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen suatu entitas yang menggunakan Standar ini harus membuat penilaian kemampuan entitas terhadap kelangsungan usaha. Suatu entitas akan terus berlangsung kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif lain kecuali melakukan hal-hal tersebut. Ketika manajemen menyadari hal ini, dalam membuat penilaian tentang ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyiapkan laporan keuangan berdasarkan kelangsungan usaha, fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyiapan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipandang dalam kelangsungan usaha.

4. Frekuensi pelaporan

Entitas harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut;
- b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan

c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, Laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

5. Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a) terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian yang menghasilkan penyajian yang lebih tepat dengan tidak mengabaikan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
- b) Standar ini mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- a) alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

6. Informasi komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Standar ini (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

7. Materialitas dan agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis yang masing-masing dapat menjadi faktor penentu.

8. Laporan keuangan lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi:

(a) neraca

(b) laporan laba rugi

(c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:

(i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau

(ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

(d) laporan arus kas; dan

(e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan mendasar periode yang lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan atas penghasilan dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Karena dalam Standar ini mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan), suatu laporan

keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama. Entitas dapat menggunakan judul untuk laporan keuangan selain yang digunakan dalam Standar ini sepanjang tidak menyesatkan.

9. Identifikasi laporan keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporannya dan membedakan laporan keuangan tersebut dari informasi lain dalam dokumen yang sama. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- (a) nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
- (b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
- (c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- (d) mata uang pelaporan; dan
- (e) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.8.4 Ketentuan Transisi

Entitas menerapkan SAK UKM secara prospektif, namun entitas diperkenankan untuk menerapkan standar ini secara retrospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:

- (a) mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam Standar ini.
- (b) tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika standar ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
- (c) mereklasifikasikan pos-pos yang diakui dalam kerangka pelaporan keuangan sebelumnya sebagai satu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas, tetapi merupakan jenis yang berbeda dari aset, kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan Standar ini;
- (d) menerapkan Standar ini dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan Standar ini mungkin berbeda dari yang digunakan

untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kondisi atau kejadian lain sebelum tanggal efektif standar ini diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal efektif Standar ini. Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini dianjurkan.

2.9 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 1, pengertian usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro bersama dengan usaha kecil terbukti mampu bertahan menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kekuatan UKM dalam menopang ekonomi moneter secara nasional bertumpu pada beberapa keunggulan UKM dibanding usaha besar, yaitu:

1. UKM biasanya memenuhi permintaan yang terjadi di wilayah regionalnya sehingga UKM menyebar di seluruh pelosok dengan ragam bidang usaha.
2. Mempunyai keleluasaan atau kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar mengingat modal sebagian besar terserap pada modal kerja dan sangat kecil yang dimasukkan dalam aktiva tetap sehingga yang dipertaruhkan juga kecil.
3. Sebagian besar UKM adalah padat karya mengingat teknologi yang digunakan UKM relatif sederhana.
4. Selain memiliki kekuatan-kekuatan, UKM pun tidak lepas dari permasalahan.

Riana Panggabean (2002) menyatakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia dan Manajemen

SDM usaha kecil sebagian besar memiliki keterbatasan baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan keterampilan, sehingga

menyebabkan motivasi berwirausaha menjadi tidak cukup kuat untuk meningkatkan usaha dan meraih peluang pasar. Dengan keterbatasan pendidikan tersebut, pada umumnya manajemen usaha kecil dikelola turun temurun dan hanya memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya tidak adanya sistem pembukuan yang mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.

2. Modal

Permodalan merupakan satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan UKM tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan yang disediakan pemerintah sulit didapatkan oleh pengusaha kecil. Dengan keterbatasan modal tersebut UKM sulit berkembang dan masuk dalam jajaran bisnis formal yang lebih besar, sehingga mendapatkan margin usaha yang cenderung tipis.

3. Teknologi

Pengembangan teknologi bertujuan untuk mengembangkan produksi menjadi lebih produktif, efisien dan dapat meningkatkan kualitas produk. Sebagian pelaku usaha kecil masih dihadapkan pada kendala informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

4. Lemahnya Asosiasi

Belum ada asosiasi usaha kecil yang anggotanya mempunyai latar belakang pengusaha. Membangun asosiasi sebaiknya dapat dikondisikan oleh lembaga penyedia jasa yang bertugas melayani usaha kecil sehingga secara alamiah asosiasi tersebut benar-benar tumbuh dari mereka dan berjuang untuk kepentingan UKM.

2.9.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ada berbagai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang digunakan oleh beberapa pihak sebagai tolok ukur untuk menentukan sebuah usaha dapat digolongkan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut beberapa kriteria yang dikemukakan oleh beberapa pihak tersebut, yakni:

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tabel 2.1 Kriteria Kerja

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan	Sampai dengan 50 juta	> 50 juta-500 juta	> 500 juta – 10 miliar
Hasil Penjualan Pertahun	Paling banyak 300 juta	300 juta – 2,5 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar

Tabel 2.2 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Tenaga Kerja	< 5 orang	5-19 orang	20-99 orang	> 100 orang

c) Menurut Bank Dunia

Usaha mikro yaitu usaha gabungan (*partnership*) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari sepuluh orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*).

Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat survival yaitu usaha untuk mempertahankan hidup (*survival level activities*), yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro yaitu pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp 25.000.000.